

Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia



LAPORAN TAHUNAN KINERJA KEMITRAAN (APPR) 2012

Desember 2012



KEMITRAAN PENDIDIKAN AUSTRALIA-INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN KINERJA KEMITRAAN (APPR) 2012

Desember 2012

Dikelola untuk AusAID oleh GRM International Pty Ltd

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
---------------------------------	-----------

PENDAHULUAN 1

1 Apa Konteksnya?.....	3
1.1 Tingkat Nasional.....	3
1.2 Tingkat Daerah.....	4
1.3 Tingkat Komponen.....	5
2 Apa Yang Telah Dicapai?.....	6
2.1 Hasil-hasil Utama Hingga Saat Ini.....	6
2.2 EOPO 1: Meningkatnya Partisipasi pada Pendidikan Menengah Tingkat Pertama di Kabupaten Sasaran.....	7
2.3 EOPO 2: Meningkatnya Pengelolaan Sekolah dan Madrasah.....	8
2.4 EOPO 3: Meningkatnya Kualitas Madrasah Sejalan Dengan SPN.....	9
2.5 EOPO 4: Penggunaan Temuan Riset Oleh Pembuat Kebijakan Untuk Menginformasikan Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran Sektor Pendidikan.....	10
3 Bagaimana Hasil-hasil Tersebut Dicapai?.....	11
3.1 Mekanisme Pelaksanaan.....	11
3.2 Kemitraan.....	13
3.3 Keberlanjutan.....	14
4 Siapa Yang Menikmati Hasilnya?.....	15
4.1 Penerima Manfaat.....	15
4.2 Kelompok Rentan.....	15
5 Apa Implikasinya?.....	16

LAMPIRAN

Lampiran I	Proses Persiapan APPR
Lampiran II	Dokumen EP yang Ditelaah
Lampiran III	Kerangka Analitis EP
Lampiran IV	Daftar Informan Utama
Lampiran V	Teori Perubahan EP
Lampiran VI	Standar M&E ECBP
	Standar 3: Pelaporan Kemajuan Inisiatif

DAFTAR SINGKATAN

ACDP	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i> – Kemitraan di bidang Pengembangan Kapasitas dan Analisis
(AI)BEP	<i>(Australia-Indonesia) Basic Education Program</i> – Program Pendidikan Dasar (Australia-Indonesia)
APPR	<i>Annual Partnership Performance Report</i> – Laporan Tahunan Kinerja Kemitraan
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AusAID	<i>Australian Agency for International Development</i> – Badan Pemerintah Australia untuk Pembangunan Internasional
A\$	Dolar Australia
BAN S/M	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
C1 (2,3,4)	Komponen 1 (2,3,4)
CPD	<i>Continuous Professional Development</i> – Pengembangan Profesional Berkelanjutan
ECBP	<i>Evaluation Capacity Building Program</i> – Program Pengembangan Kapasitas Evaluasi
EP	<i>Education Partnership</i> – Kemitraan di Bidang Pendidikan
EP-PMS	<i>Education Partnership-Performance Management Sistem</i> – Kemitraan di Bidang Pendidikan-Sistem Manajemen Kinerja
EOPO	<i>End of Partnership Outcomes</i> – Capaian Hasil Akhir Kemitraan
IPDET	<i>International Program for Development Evaluation Training</i> – Program Internasional Pelatihan Evaluasi Pembangunan
JRF	<i>Joint Results Framework</i> – Kerangka Hasil Bersama
JSE	<i>Junior Secondary Education</i> – Pendidikan Tingkat Menengah Pertama
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian PU	Kementerian Pekerjaan Umum
KSI	<i>Knowledge Sector Initiative</i> – Inisiatif Sektor Pengetahuan
LPPKS	Lembaga Pengembangan and Pemberdayaan Kepala Sekolah
MDC	<i>Madrasah Development Centre</i> – Pusat Pengembangan Madrasah
MoA	<i>Memorandum of Agreement</i> – Nota Kesepakatan
PDB	Pendapatan Domestik Bruto
PENDIS	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
PENMA	Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah

PEO	<i>Provincial Education Officer</i> – Pejabat Pendidikan tingkat Provinsi
POM	<i>Performance Oversight and Monitoring</i> – Pengawasan dan Monitoring Kinerja
PPP	<i>Principals Preparation Program</i> – Program Persiapan Kepala Sekolah
Pusbang- Tendik	Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
QAI	<i>Quality At Implementation</i> – Mutu Pelaksanaan
RENSTRA	Rencana Strategis
Rp	Rupiah
SATAP	Sekolah Satu Atap
SCC	<i>School Construction Committee</i> – Panitia Pembangunan Sekolah
SNIP	<i>Sub-national Implementation Partner</i> – Mitra Pelaksana Daerah
SSQ	<i>School Systems and Quality</i> – Sistem dan Mutu Sekolah
§	(Sub)bagian
UBE	<i>Universal Basic Education</i> – Pendidikan Dasar Universal
USB	Unit Sekolah Baru
WiPS	<i>Working in Partner Systems</i> – Bekerja dalam Sistem Mitra

RINGKASAN EKSEKUTIF

Investasi sebesar A\$500 juta pada Kemitraan Pendidikan (*Education Partnership*, yang selanjutnya akan disebut EP) merupakan prakarsa pembangunan unggulan Australia di Indonesia. Laporan Tahunan Kinerja Kemitraan (APPR - *Annual Partnership Performance Report*) memaparkan gambaran kemajuan yang dicapai Kemitraan ini di segala tingkat kerangka logika EP dalam periode satu tahun dan dengan memperhatikan tema-tema umum dan tema pembangunan lintas bidang. APPR terbagi dalam lima bagian yang mencakup konteks kegiatan EP; capaian yang diperoleh EP hingga saat ini; bagaimana pencapaian tersebut terjamin secara pasti; siapa yang memperoleh manfaat dari EP; dan implikasi apa saja yang dapat dipetik sebagai masukan bagi upaya-upaya di masa mendatang.

Konteks

Di tingkat nasional, komitmen baru dari Pemerintah RI terhadap pendidikan dasar universal 12 tahun sepertinya akan berdampak pada prioritas sektoral dan pendanaan di tahun-tahun mendatang, yang kemungkinan akan mempengaruhi sasaran EP. Sehubungan dengan keuangan publik, saat ini Pemerintah RI mempertahankan komitmennya untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, meskipun terjadi penurunan proporsi belanja pendidikan dalam PDB sejak tahun 2009. Di tingkat daerah, kabupaten telah meningkatkan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan pendidikan. Meskipun pemerintah kabupaten memiliki kapasitas manajemen yang berbeda-beda, bukti-bukti yang tersedia menunjukkan adanya gerakan secara luas untuk menutup kesenjangan pemerataan pendanaan.

Capaian

Berbagai hasil signifikan berhasil diperoleh sejak EP mulai dilaksanakan. Akan tetapi, sulit untuk menilai seberapa jauh hasil-hasil tersebut mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dalam tercapainya EOPO (*End-of-Partnership Outcomes* -Capaian Hasil Akhir Kemitraan), mengingat kurangnya sasaran atau patokan yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran.

Untuk EOPO 1, pembangunan sekolah tengah berjalan dengan baik namun terjadi keterlambatan. Isu-isu yang dihadapi saat ini berkisar pada tepat-tidaknya pembangunan sekolah baru sebagai respon terbaik dalam penyediaan sarana untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan; proses pemilihan lokasi serta jumlah dan mutu proposal yang masuk; serta cara terbaik untuk menyeimbangkan peran *field monitor*.

Untuk EOPO 2, pembentukan sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang bersifat komprehensif didasarkan pada digunakannya pendekatan baru bagi pengembangan profesi berbasis kompetensi di Kemendikbud. Sebelum diluncurkannya skema nasional ini, sudah terdapat landasan yang kokoh. Komitmen nasional terhadap sistem ini sangat menggembirakan, namun juga terdapat risiko yang terkait dengan pengalihan tanggung jawab pengelolaan sistem pelatihan dari SSQ kepada Pusbang Tendik di Kemendikbud di tahun 2013.

Untuk EOPO 3, dorongan untuk meningkatkan kualitas sudah selaras dengan komitmen Kemenag dalam mendukung Madrasah menjadi penyedia pendidikan alternatif bagi anak-anak Indonesia.

Bukti-bukti yang menggembirakan terkait dukungan kelembagaan untuk sistem pendukung ini juga diimbangi dengan adanya kebutuhan memiliki strategi keberlanjutan yang efektif agar hasil-hasil yang telah diperoleh sejauh ini tetap kuat.

Untuk EOPO 4, berbagai kemajuan telah tercapai dalam mempengaruhi kebijakan, dan lebih terlihat lagi, dalam mempengaruhi keputusan yang menafsirkan, mengoperasikan, dan mengimplementasikan berbagai strategi dan kebijakan. Meskipun masih terlalu dini untuk dapat melihat bukti-bukti bahwa model penelitian ACDP memang mempengaruhi kebijakan pendidikan, terdapat kekhawatiran tentang fleksibilitas dan jangka waktu putar (*turnaround time*) pendekatan yang digunakan. Di sisi lain, komponen-komponen lain menghasilkan perolehan yang lebih cepat, yang efektif dalam mempengaruhi keputusan di tingkat implementasi.

Pendekatan

EP dicirikan oleh adanya gabungan modalitas bantuan yang terhubung dalam benang merah yang sama: komitmen untuk memperkuat sistem nasional penyediaan layanan pendidikan. Meskipun gabungan modalitas ini merupakan respon yang baik dan tepat yang sepertinya menawarkan peluang yang baik untuk membangun kapasitas melalui pengembangan sistem, penggunaan berbagai modalitas ini justru menekankan adanya risiko bahwa berbagai komponen yang ada akan bekerja dalam ruangnya sendiri-sendiri, dan bahwa kemitraan ini dilaksanakan sebagai empat prakarsa yang tidak berjalan bersamaan. EP juga menysasar dan memanfaatkan mekanisme implementasi yang berbeda di lapangan. Mekanisme ini mencerminkan sistem nasional yang disasar oleh EP, yang dipilih dengan justifikasi berdasarkan asumsi bahwa mekanisme ini memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar dalam mencapai dan mempertahankan keluaran dan capaian hasil di tingkat komponen.

“Kemitraan” di bidang pendidikan lebih mencerminkan filosofi ketimbang sebagai suatu pendekatan. EP merupakan program dengan banyak sisi (*multi-faceted*) yang dipimpin oleh Pemerintah RI dan AusAID yang memiliki beberapa kemitraan dan hubungan di tingkat operasional yang lebih rendah. Luasnya program dan adanya berbagai pemangku kepentingan membuat manajemen yang proaktif sulit tercapai, dan situasi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa mekanisme tata kelola yang ada masih belum termanfaatkan dengan baik.

Penerima Manfaat

EP memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi perubahan sistemik agar manfaat EP dapat bertahan lebih lama dibandingkan umur EP sendiri. Akan tetapi ambisi ini perlu diterjemahkan ke dalam strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) yang efektif. Selain itu, identifikasi para penerima manfaat dikaitkan dengan strategi inklusi sosial akan dapat menjelaskan lebih lanjut keterkaitan antara tujuan EP dan tujuan inklusi sosial, yang juga merupakan sebuah langkah yang penting.

Implikasi

Berbagai temuan telah dirangkum dan dihubungkan dengan rekomendasi terkait. Tanggung jawab utama dalam implementasi tiap rekomendasi telah diidentifikasi dan masing-masing rekomendasi dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kepentingan (*urgency*). Beberapa rekomendasi yang termasuk paling penting dan mendesak ialah sebagai berikut:

- Menyepakati klasifikasi para penerima manfaat serta mengidentifikasi dampak realistis yang ingin dicapai
- Memperkuat manajemen EP dengan meningkatkan sumber daya manajemen senior AusAID yang memiliki cakupan dan tanggung jawab atas EP secara keseluruhan
- Mengkonsolidasikan teori perubahan EP agar dapat memasukkan asumsi yang jelas tentang tiap-tiap langkah pada kerangka logika EP serta ekspektasi hasil-hasil yang jelas dan terukur untuk tiap langkah pada kerangka logika EP dengan menentukan tolok ukur kinerja (*performance milestones*)
- Mengkaji kembali proses pemilihan kabupaten dan lokasi pembangunan sekolah, agar memasukkan transisi dari SD ke SMP sebagai indikator
- Membentuk proses monitoring yang kokoh bagi implementasi kesepakatan hibah C2, dengan tolok ukur hasil dan sasaran yang jelas, serta fungsi pendukung yang jelas bagi SSQ
- Memonitor peluang dan hambatan bagi Kemenag untuk menjalankan model SNIP/MDC (Mitra Pelaksana Daerah/Pusat Pengembangan Madrasah)
- Mempertimbangkan mekanisme tanggapan tambahan bagi ACDP, termasuk penyilangan antara ACDP dan KSI yang baru didanai oleh AusAID

Rekomendasi yang termasuk tingkat kepentingan menengah ialah sebagai berikut:

- AusAID dan Pemerintah RI menegosiasikan dihapuskannya prinsip *non-additionality* untuk dana EP
- Menugaskan dilakukannya kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan pendidikan dari kabupaten, termasuk upaya-upaya untuk memitigasi risiko dampak substitusi keuangan di tingkat kabupaten.
- Finalisasi, sosialisasi serta implementasi strategi inklusi sosial EP, termasuk mekanisme untuk mengkaji implementasinya
- Mengkaji kembali mekanisme tata kelola EP demi menghindari terulangnya struktur manajemen paralel, serta untuk mengelola kinerja EP secara proaktif
- Mengkonsolidasikan teori perubahan EP, agar dapat mengikutsertakan catatan-catatan yang secara komprehensif memuat risiko di tingkat EP
- Melakukan diversifikasi pendekatan C1 agar dapat mengakses peningkatan serta pada saat yang bersamaan juga mempertahankan fokus pada penyediaan infrastruktur, misalnya, mendukung rehabilitasi sekolah dan/atau program-program ekstensi.
- Mengkaji kembali target konstruksi dengan memperhatikan kerangka waktu dan kapasitas yang ada
- Membuat kajian untuk memahami faktor-faktor kapasitas serta mengidentifikasi tindakan untuk mengembangkan kapasitas kabupaten agar dapat memenuhi kewajiban mereka sebagaimana ditetapkan oleh Kemenag.

-
- Mengidentifikasi langkah-langkah-antara dalam kerangka logika C2 agar dapat mengartikulasikan pergeseran yang diharapkan dari segi pengetahuan, sikap, dan praktik pada fase pasca-pelatihan, dengan mekanisme yang sesuai untuk melakukan kajian mengenai perbandingan antara kemajuan yang diperoleh, dengan ekspektasi
 - Mengkaji kembali model ACDP untuk dapat memasukkan pertimbangan peran insentif dan budaya organisasi dalam membentuk titik temu bukti/kebijakan, menggunakan 'perantara pengetahuan' serta dengan strategi sosialisasi yang sesuai
 - Memperkuat kerangka logika C4 untuk dapat memasukkan asumsi-asumsi dasar serta memasukkan pergeseran yang diharapkan dari segi pengetahuan, sikap, dan praktik terkait dengan para pengambil kebijakan yang relevan

Rekomendasi yang termasuk tingkat kepentingan rendah ialah sebagai berikut:

- Mempertimbangkan relevansi tujuan-tujuan EP terkait dengan RENSTRA di masa mendatang
- Mempertimbangkan relevansi tujuan-tujuan EP terkait dengan sasaran-sasaran baru pada JRF (Kerangka Hasil Bersama)
- Memonitor anggaran bagi bidang-bidang dukungan EP yang dianggap penting melalui *Annual Sector Financial Report* (Laporan Keuangan Tahunan Tingkat Sektor)
- Memperkuat teori perubahan EP agar turut memasukkan pemetaan komprehensif terkait prakarsa donor-donor yang ada di bidang pendidikan, serta posisi relatif EP
- Mempertimbangkan dimasukkannya sekolah-sekolah yang termasuk Pendidikan Tingkat Menengah Atas (SSE) di C1
- Membuat kajian untuk dapat memahami faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya kabupaten yang tidak menyerahkan proposal (*non-submission*), sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah perbaikannya
- Mengkaji kembali serta mengklarifikasi peran para pengawas lapangan terkait dengan makin besarnya keterlibatan dalam pengawasan proses konstruksi
- Melakukan penyesuaian atas muatan pedagogis pada materi pelatihan CPD agar dapat dilakukan secara *on-line* serta mengembangkan ketrampilan pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) bagi para penerima manfaat
- Mengembangkan strategi keberlanjutan untuk C3

Mendorong para pengambil kebijakan yang terlibat dalam EP untuk memanfaatkan ACDP serta memberi masukan bagi kegiatan ACDP berdasarkan pembelajaran dan temuan yang diperoleh dari EP.

PENDAHULUAN

Kemitraan di Bidang Pendidikan

Investasi sebesar AUD 500 juta untuk EP (Kemitraan di Bidang Pendidikan) merupakan inisiatif pembangunan unggulan Australia di Indonesia. Dengan visi meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan di Indonesia, diharapkan, pada tahun 2016, kemitraan ini akan berhasil meningkatkan angka partisipasi pada pendidikan menengah pertama di kabupaten-kabupaten sasaran; meningkatkan pengelolaan sekolah dan madrasah; meningkatkan kualitas madrasah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SPN), dan memungkinkan peningkatan dalam pemanfaatan hasil penelitian oleh para pembuat kebijakan pendidikan untuk memberikan masukan pada kebijakan, perencanaan dan penganggaran di sektor pendidikan.

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan EP ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan seksama, 'keuntungan pembangunan' perlu dihasilkan dan diukur, serta hasil dan pelajaran EP perlu dirangkum dan dibagikan. Tim EP POM ditugaskan untuk menghasilkan bukti yang tepat waktu dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sehingga AusAID (dan mitra-mitranya) dapat menjaga investasi Australia dalam EP; meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan EP; memperkuat dialog kebijakan pendidikan dengan Pemerintah Indonesia; dan menyediakan panduan ke depan bagi investasi Australia di sektor pendidikan di Indonesia.

Laporan Tahunan Kinerja Kemitraan

Laporan Tahunan Kinerja Kemitraan (APPR - *Annual Partnership Performance Report*) memaparkan gambaran kemajuan yang dicapai Kemitraan ini di segala tingkat kerangka logika EP dalam periode satu tahun dan dengan memperhatikan tema-tema umum dan tema pembangunan lintas bidang. Laporan ini berupaya memberikan bukti untuk meningkatkan kinerja EP, memberikan masukan informasi pada dialog kebijakan antara AusAID dan Pemerintah Indonesia, dan memberikan panduan arah strategis dengan mempertimbangkan prioritas sektor pendidikan yang ada. Singkatnya, APPR ini diharapkan akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan program untuk 'membuktikan' (akuntabilitas) dan 'meningkatkan' (pengelolaan) kinerja program.

Fokus APPR perdana ini adalah kemajuan EP sejak dimulainya pada Agustus 2011 hingga Desember 2012. APPR selanjutnya akan melaporkan dan menganalisis baik kemajuan selama tahun kalender, maupun kemajuan sejak dimulainya program hingga saat ini. APPR Tahun 2012 bermula dari analisis khusus yang dilakukan oleh Tim POM pada bulan November dan Desember 2012. Pada Lampiran I dijelaskan proses penyusunan APPR. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap utama: tinjauan bukti dokumen¹ yang dihasilkan dalam EP (misalnya laporan monitoring, laporan penelitian, laporan teknis) dan dikaji melalui lensa analitis kerangka EP-PMS²; serangkaian wawancara narasumber utama³ untuk menggali dan menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan kinerja EP sejak awal

¹ Daftar dokumen yang diperiksa dengan seksama dapat dilihat di Lampiran II

² Kerangka Analitis EP dilampirkan sebagai Lampiran III

³ Daftar narasumber utama yang diwawancarai dapat dilihat di Lampiran IV

pembentukannya, dan lokakarya konsultasi dengan para pemangku kepentingan EP pada 7 Desember 2012 di mana POM berusaha mendapatkan umpan balik dalam hal temuan dan implikasi⁴.

EP masih dalam tahap pengembangan sehingga bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk membuat komentar yang berwawasan dan penuh pertimbangan masih terbatas. Namun demikian, kebutuhan penilaian eksternal tetap ada dan APPR tahun ini banyak menekankan nuansa dan arah untuk tinjauan-tinjauan berikutnya karena APPR ini berisi komentar berdasarkan bukti tentang status dan arah yang ada saat ini. APPR mencerminkan komitmen POM untuk memfasilitasi pengembangan budaya refleksi kritis terkait pencapaian dan arah EP. Refleksi yang dilakukan atas pencapaian dan arah tersebut penting untuk meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas.

Struktur APPR

APPR disusun sedemikian rupa untuk menyajikan informasi secara ringkas dan logis. Pedoman isi laporan ini mengacu pada Standar Monitoring dan Evaluasi yang dikembangkan Program Pembangunan Kapasitas Evaluasi Jakarta AusAID (ECBP). Lebih khusus lagi, laporan ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap fitur-fitur yang diusulkan yang tercantum dalam 'Standar 3: Pelaporan Kemajuan Inisiatif', yang disertakan sebagai Lampiran VI.

APPR dibagi menjadi lima bagian:

- Bagian 1 menyajikan konteks operasional Kemitraan Pendidikan dan menganalisis sifat konteks tersebut yang berkembang. Bagian ini berupaya menentukan relevansi berkelanjutan dari EP.
- Bagian 2 meninjau apa saja yang telah dicapai EP hingga saat ini dalam hal keluaran utama. Bagian ini berupaya menentukan kemajuan yang memadai dalam kaitannya dengan EOPO (Capaian Hasil Akhir Program).
- Bagian 3 menggali bagaimana pencapaian yang sudah dicapai hingga saat ini diperoleh. Bagian ini berupaya menentukan efektivitas dan efisiensi mekanisme penyelenggaraan dan pendekatan kemitraan serta keberlanjutan EP.
- Bagian 4 membahas pihak-pihak mana saja yang telah menerima manfaat dari EP dan berupaya menentukan pihak-pihak mana yang dimaksudkan atau kemungkinan besar menjadi penerima manfaat serta siapa saja penerima manfaat yang sebenarnya.
- Bagian 5 menyajikan implikasi utama dari analisis bagian-bagian sebelumnya dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang ditargetkan dan diprioritaskan.

⁴ Lokakarya APPR dihadiri oleh perwakilan senior dari Kemendikbud, Kemenag, AusAID Jakarta dan SSQ. Perwakilan ACDP diundang tetapi berhalangan hadir.

1 Apa Konteksnya?

Bagian ini menjelaskan konteks pelaksanaan EP, yaitu sektor pendidikan di Indonesia. Seiring dengan kemitraan yang memasuki tahun 2013, penilaian relevansi keberlanjutan program tepat dilaksanakan untuk memungkinkan dilakukannya penyesuaian yang mungkin diperlukan. Bagian ini dibagi menjadi tiga bagian, yang menyajikan isu-isu kontekstual i) di tingkat nasional, ii) di tingkat daerah dan iii) khususnya yang terkait dengan komponen EP.

1.1 Tingkat Nasional

Sebagaimana diuraikan dalam Teori Perubahan EP, tujuan EP secara langsung terkait dengan tujuan Renstra 2010-2014 dan tujuan yang tertuang dalam *Joint Result Framework* (JRF). Meskipun baik Renstra maupun JRF masih berlaku dan berfungsi sebagai titik acuan yang kuat bagi EP, target JRF sendiri saat ini sedang dievaluasi kembali dan ada kemungkinan beberapa di antaranya akan berubah dalam waktu dekat. Hal ini seharusnya tidak memberikan pengaruh yang mendasar bagi tujuan EP dan kerangka logika EP, tetapi berbagai penyesuaian kecil mungkin perlu dilakukan. Setelah disetujui, Renstra berikutnya, yang mencakup periode 2015-19, berpotensi memberikan penekanan pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan lingkungan mengajar untuk 12 tahun pendidikan dasar, dengan dukungan pemerintah yang lebih baik.

Dalam hal keuangan publik, Pemerintah Indonesia menjaga komitmennya pada sektor ini. Temuan penting dalam hal ini adalah:

- Pada tahun 2011, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghabiskan 20% dari APBN untuk pendidikan sudah terpenuhi selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun hal ini patut mendapat pujian, pencapaian tersebut ternyata tidak menghasilkan peningkatan dana riil yang tersedia untuk pendidikan setiap tahunnya. Peningkatan riil dalam pendanaan nasional untuk pendidikan tidak banyak berubah sejak tahun 2009 dengan pertumbuhan belanja pendidikan yang hanya sedikit melampaui inflasi.
- Telah terjadi penurunan belanja pendidikan secara proporsional terhadap PDB sejak 2009. Belanja biaya pendidikan sebagai persentase PDB meningkat dari 2,5% pada tahun 2001 menjadi 3,7% pada tahun 2009, tetapi angka tersebut kemudian turun menjadi 3,3% pada tahun 2011. Meskipun belanja pendidikan telah bertumbuh sedikit lebih cepat daripada belanja publik nasional, belanja pendidikan telah terlampaui oleh pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan yang lebih cepat (diukur dari PDB). Hal ini menunjukkan bahwa, di tahun-tahun mendatang, pertumbuhan belanja pendidikan publik nasional akan terus mengikuti pertumbuhan pada anggaran publik nasional.
- Rata-rata belanja per siswa di seluruh Indonesia mengalami pertumbuhan sangat signifikan pada tahun 2011 (Rp. 2,8 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan Rp 2 juta pada tahun 2010.). Angka peningkatan ini besar dibandingkan pertumbuhan belanja yang stagnan pada tahun 2010. Rata-rata belanja per siswa kini jauh lebih tinggi di daerah pedesaan yang mencapai Rp. 2,9 juta per siswa pada tahun 2011, dibandingkan dengan Rp. 2,4 juta per siswa di perkotaan.

Perubahan besar dalam kebijakan pendidikan di Indonesia adalah komitmen baru Pemerintah Indonesia terhadap pendidikan dasar 12 tahun – yang naik dari angka saat ini yaitu 9 tahun. Hal ini dipastikan akan berdampak besar pada prioritas sektoral dan pembiayaan di tahun-tahun

mendatang, dan mungkin dapat berdampak pada prioritas EP. Pada tahap ini masih belum jelas bagaimana pelaksanaan kebijakan baru tersebut akan dibiayai, dan apakah target 20% dari belanja negara akan tetap berlaku. Sejumlah analisis mengenai pembiayaan saat ini sedang dilakukan, khususnya melalui ACDP, dan bukti mulai bermunculan dan terdapat kekhawatiran yang realistis bahwa anggaran akan diperketat, sehingga berdampak pada bidang-bidang sektor yang didukung EP (misalnya, infrastruktur pendidikan tingkat menengah pertama). Jika tidak berubah, prinsip *non-additionality* atas dana donor di sektor pendidikan yang saat ini berlaku untuk EP akan meningkatkan dampak akan pentingnya EP.

1.2 Tingkat Daerah

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi Pemerintah Indonesia saat ini, kabupaten memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penyediaan layanan pendidikan namun dengan kapasitas pengelolaan yang masih belum merata. Oleh karena itu, monitoring belanja daerah menjadi semakin penting: Kemendikbud dan Kemenag perlu memastikan bahwa norma dan prosedur pendanaan nasional dilaksanakan dengan tepat.

Dalam hal keuangan kabupaten, terdapat gambaran yang menggembirakan karena adanya bukti semakin meluasnya pergerakan untuk menutup kesenjangan, setidaknya pada tingkat makro. Temuan-temuan penting dalam hal ini adalah:

- Indonesia saat ini bergerak menuju distribusi dana yang lebih merata pada kabupaten untuk sekolah: terdapat sumber daya publik yang lebih besar yang dialokasikan per siswa untuk kabupaten termiskin, dan sebaliknya kabupaten terkaya menerima alokasi yang lebih sedikit. Pada tahun 2011, kabupaten dari dua kuintil termiskin meningkatkan alokasi mereka lebih cepat dibandingkan kabupaten lain dan menerima lebih banyak dana per siswa dibandingkan kabupaten lain di kuintil kemiskinan lainnya.
- Rata-rata belanja pendidikan kabupaten meningkat dari 31% dari total APBD kabupaten pada tahun 2010 menjadi 37% pada tahun 2011. Secara khusus, kabupaten-kabupaten termiskin (kuintil terbawah) mencatat rata-rata kenaikan tahunan sebesar 40% pada anggaran pendidikan mereka pada tahun 2011 (dari 2010). Ini adalah hasil yang sangat positif bagi kabupaten termiskin karena telah berhasil mencapai persentase kenaikan rata-rata tertinggi pada pendidikan dari semua kuintil kemiskinan. Pertumbuhan tinggi anggaran pendidikan yang terus berlanjut di kabupaten termiskin ini jauh melebihi tingkat inflasi tahunan.
- Hanya enam dari kabupaten kuintil termiskin (semua di Papua) yang mengalami penurunan dalam hal dana APBD tahun 2011 yang dikhususkan untuk pendidikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 terdapat 37 kabupaten kuintil termiskin yang mencatatkan pengurangan alokasi pendidikan mereka dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
- Alokasi anggaran pendidikan kabupaten tertinggi per siswa ditemukan di kabupaten termiskin: kabupaten termiskin (kuintil 5) memiliki rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp. 3,3 juta per siswa, dibandingkan dengan alokasi kabupaten sebesar Rp. 2,5-2,9 juta pada kuintil kemiskinan lainnya. Alokasi per siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk. Kabupaten yang jarang penduduknya (seperti kabupaten di wilayah timur Indonesia dan banyak kabupaten yang berada di kabupaten kuintil termiskin) memiliki rata-rata biaya gaji yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan

rendahnya rasio siswa / guru serta biaya tinggi yang terkait dengan gaji yang terkait dengan tunjangan daerah terpencil.

1.3 Tingkat Komponen

Seperti halnya banyak bidang kebijakan dengan visibilitas dan pendanaan publik yang tinggi, sektor pendidikan Indonesia bersifat dinamis: ada perdebatan kebijakan sedang berlangsung, dan perombakan yang dilakukan secara berkala terhadap tanggung jawab, posisi, pendanaan dan prioritas pelaksanaan. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh AusAID dan komunitas donor juga berkembang seiring dengan adanya agenda-agenda dan program-program baru. Keadaan ini menciptakan peluang dan ancaman bagi kegiatan yang didanai EP. Poin-poin berikut ini meringkas sejumlah perubahan konteks yang baru-baru ini terjadi, yang terkait dengan komponen EP.

Komponen 1

- Prioritas infrastruktur pendidikan tingkat menengah pertama dari Kemendikbud saat ini menitikberatkan pada rehabilitasi sekolah ketimbang pembangunan sekolah: di bawah AIBEP, AusAID mendanai 30% sekolah baru yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan EP sekarang mendanai 80% program pembangunan sekolah.

Komponen 2

- AusAID telah menyelesaikan penilaian WiPS (Working in Partner System) atas sistem pengadaan dan keuangan Pemerintah Indonesia yang mempersiapkan pelaksanaan C2 melalui sistem pemerintah Indonesia, sehingga memungkinkan transisi tanggung jawab pengelolaan sistem pengembangan profesional berkelanjutan (CPD) dari kontraktor Sistem dan Kualitas Sekolah (SSQ) kepada Kemendikbud.
- Kemungkinan besar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan diberlakukan untuk pendidikan dasar 12 tahun, dengan potensi lonjakan alokasi pada tahun 2013 atau 2014 (mungkin akan lebih dari 15% dari total belanja kabupaten untuk sekolah).
- Model berbasis kompetensi untuk sistem pengembangan profesional pendidik dan pejabat telah diterima dengan sepenuh hati oleh Kemendikbud dan Kemenag, dan disertai dengan dorongan besar untuk mengembangkan pelaksanaan sistem tersebut secara online.

Komponen 3

- Rencana strategis nasional baru Kemenag telah disahkan menjadi Peraturan oleh Direktur Jenderal PENDIS dan Direktur PENMA and disetujui untuk dilaksanakan mulai Januari 2012. Ini adalah hal yang pertama untuk Kemenag dan mencakup peraturan tentang kebijakan akreditasi nasional dengan dokumen dan pelatihan pendukung yang sesuai sebagai bagian dari paket.

Komponen 4

- Persyaratan untuk mendasarkan kebijakan pada temuan penelitian yang andal dan bukti-bukti tetap tidak berubah.
- AusAID meluncurkan program baru di sektor pengetahuan (Inisiatif Sektor Pendidikan/KSI) yang salah satu fokusnya adalah sektor pendidikan.

2 Apa Yang Telah Dicapai?

Meskipun teori perubahan EP menggambarkan jalur yang diharapkan dilalui perubahan-perubahan yang akan terjadi, teori tersebut tidak mengidentifikasi tahapan pencapaian (*milestone*) atau target yang ada di sepanjang jalur tersebut dan, oleh karena itu, tidak memberikan kerangka yang terperinci yang memungkinkan dilakukannya penilaian atas kemajuan yang dicapai hingga saat ini. Namun, sejak pembentukannya, EP telah mencapai hasil yang signifikan dan hasil-hasil tersebut layak dikomentari. Bagian ini menyajikan beberapa hasil yang dimaksud - sebagian besar pada tingkat keluaran - dan komentar mengenai pencapaian dalam kaitannya dengan EOPO juga disampaikan.

2.1 Hasil-hasil Utama Hingga Saat Ini

Angka-angka dalam Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran yang luas mengenai capaian terpilih komponen EP sejak awal.

Tabel 1: Pencapaian utama EP

Angka utama	Pencapaian EP
451	Jumlah pembangunan sekolah yang dimulai di bawah C1 (115 USB dan 336 SATAP) di 142 kabupaten di 28 provinsi
1.240	Jumlah kepala sekolah yang dilatih pada pelatihan CPD tingkat 1 di 31 kabupaten di 5 provinsi (= 0,5% dari total populasi kepala sekolah)
248	Jumlah pengawas yang dilatih pada pelatihan CPD level 1 di 31 kabupaten di 5 provinsi
1.728	Jumlah calon kepala sekolah yang dilatih pada uji coba Program Persiapan Kepala Sekolah (PPP) di 91 kabupaten
1.340	Jumlah Pejabat Pendidikan Kabupaten (DEO) yang diberi pelatihan modul HRM/D yang meliputi 30 provinsi dan 268 kabupaten
450	Jumlah Pejabat Pendidikan Provinsi (PEO) yang diberi pelatihan modul HRM/D yang meliputi 30 provinsi dan 268 kabupaten
644.055	Jumlah peserta yang dilaporkan mengikuti pelatihan pengelolaan BOS (41% peserta adalah perempuan)
565	Jumlah Madrasah yang telah menerima <i>block grant</i> di bawah C3 (di 21 kabupaten di 7 provinsi)
7	Jumlah Mitra Pelaksana Daerah (SNIP) yang beroperasi dengan dukungan C3 (1 per provinsi yang ditargetkan)
3	3 Jumlah studi ACDP yang diselesaikan (10 masih sedang berjalan, 4 dalam proses pengadaan dan 5 dalam proses pengembangan)

Meskipun mencerminkan kemajuan yang nyata, angka-angka tersebut tidak sepenuhnya mewakili kemajuan EP hingga saat ini: angka-angka tersebut tidak mewakili kualitas pencapaian, dimana tidak

sedikit di antaranya yang merupakan proses (yang kadang-kadang sulit) untuk mewujudkan pencapaian ini. Angka-angka tersebut juga tidak menerjemahkan secara akurat dinamika yang kompleks dari suatu investasi seperti EP, yang hasilnya seringkali merupakan produk dari kekuatan yang muncul dengan tak terduga dan non-linear (yaitu perubahan yang diharapkan tidak berbanding lurus dengan waktu, besaran dan sifat dari input).

Meskipun masih terlalu dini untuk memberikan penilaian mengenai perubahan dan hasil yang sudah dicapai, komentar-komentar di bagian 2.2-2.5 di bawah berupaya untuk memberikan perspektif yang lebih kualitatif pada pencapaian yang berhasil diwujudkan hingga saat ini. Komentar-komentar tersebut dikumpulkan oleh Hasil Akhir Program dan, oleh karena itu, berusaha untuk menyampaikan seberapa jauh kita telah berhasil mencapai tiap-tiap EOPO.

2.2 EOPO 1: Meningkatnya Partisipasi pada Pendidikan Menengah Tingkat Pertama di Kabupaten Sasaran

EP berupaya untuk membangun hingga 2.000 sekolah baru sampai dengan pertengahan tahun 2016. Siklus pertama pembangunan sekolah dimulai pada bulan Oktober 2012, dengan beberapa penundaan dari rencana awal. Pembangunan diharapkan berhasil diselesaikan antara Maret dan Mei 2013. Penundaan dalam siklus pembangunan pertama ini membuka peluang terjadinya penundaan pada tahun-tahun berikutnya yang dapat menjadi ancaman bagi pencapaian target akhir kemitraan. Komentar tambahan mengenai pencapaian C1 adalah sebagai berikut:

- Pembangunan sekolah baru belum tentu merupakan respon yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan akses pendidikan. Pendekatan lain harus terus digali: membangun ruang kelas tambahan atau merenovasi ruang kelas pada sekolah yang sudah ada juga dapat menawarkan alternatif yang efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu, yang dirasakan bersama adalah bahwa pembangunan sekolah baru dapat meningkatkan akses bagi anak-anak yang saat ini sudah terdaftar dalam sistem (yaitu anak-anak mungkin pindah ke sekolah yang lebih dekat ke rumah mereka, atau ke sekolah dengan fasilitas yang lebih baik) tanpa perlu meningkatkan akses secara keseluruhan (adanya tambahan siswa baru yang menerima manfaat dari pendidikan menengah tingkat pertama). Meskipun situasi seperti ini mungkin dapat diterima dan bahkan ingin diwujudkan dalam hal peningkatan partisipasi sekolah, hal ini harus tegas dan jelas dinyatakan dalam tujuan EP terkait.
- Proses pemilihan lokasi dipandang sebagai langkah penting untuk efektivitas C1. Meskipun tidak ada perubahan nyata yang telah dilakukan antara proses seleksi siklus 1 (2012) dan siklus 2 (2013), sejumlah masalah telah dikemukakan:
 - Sejumlah proposal yang memenuhi syarat, yang jumlahnya lebih kecil dari yang diharapkan, telah diajukan untuk siklus pertama, sehingga menghambat penerapan kriteria yang dipilih secara ketat. Hal ini mungkin mencerminkan faktor-faktor yang berbeda seperti kebutuhan yang dirasakan terbatas dari kabupaten, kapasitas lokal yang bervariasi dalam menyusun proposal, keterbatasan akses terhadap lahan, dan / atau kemampuan kabupaten yang dirasakan rendah untuk dapat memenuhi komitmen pasca-pembangunan (pengoperasian dan pemeliharaan sekolah). Pemahaman yang lebih baik

mengenai faktor-faktor ini, serta variasi dan implikasinya terhadap usulan kabupaten perlu ditumbuhkan dan tindakan perbaikan perlu didorong.

- Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan dua langkah: pertama, kabupaten dipilih berdasarkan APK kabupaten, dan kemudian lokasi sekolah dipilih di kabupaten berdasarkan serangkaian kriteria teknis dan geografis seperti jarak ke SMP yang ada, topografi lokasi, dan jarak dengan SD terdekat yang akan menjadi sekolah pemberi siswa (*feeder school*). Meskipun pendekatan dua langkah ini belum dipertanyakan, muncul kesamaan pemikiran bahwa kriteria yang digunakan masih perlu dipertajam. Misalnya, APK tidak dianggap sebagai kriteria yang paling relevan (APM atau angka transisi dapat dijadikan kriteria yang lebih baik) dalam memilih masyarakat yang rentan. Selain itu, akurasi dan keandalan data yang mendasari tampak meragukan (banyak ditemui kesenjangan antara data di tingkat pusat dan kabupaten), dan ambang batas 90% untuk APK di tingkat kabupaten tidak diterapkan secara konsisten. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi pada kriteria APK dan penerapannya dalam pemilihan kabupaten (langkah 1). Sebagai catatan yang positif, saran untuk menggunakan pendekatan perencanaan multi-tahun untuk proposal kabupaten diterima secara luas.
- Kontraktor SSQ memberikan kombinasi dukungan teknis dan monitoring pada proses pembangunan yang menurut pandangan Kemendikbud efektif dan bermanfaat: dukungan tersebut memberikan tekanan yang sehat pada pengawasan dan menghasilkan umpan balik yang efektif bagi Kemendikbud, yang kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi. Meskipun, dalam beberapa kasus, telah dilaporkan terjadinya penundaan pelaksanaan tindakan, secara umum Kemendikbud dipandang telah mempertimbangkan umpan balik SSQ dan memberikan jawaban yang diperlukan. Terdapat keinginan untuk membahas kemungkinan keterlibatan lebih jauh dari field monitor dalam proses pembangunan.

2.3 EOPO 2: Meningkatkan Pengelolaan Sekolah dan Madrasah

Penetapan sistem CPD komprehensif di bawah C2 didasarkan pada pendekatan baru dalam pengembangan profesional berbasis kompetensi di Kemendikbud. Ini merupakan perubahan pendekatan yang berarti karena menimbulkan beberapa tantangan dalam pelaksanaannya tetapi terdapat harapan yang besar atas hasil positif dalam peningkatan pengelolaan sekolah dan madrasah. Meskipun beberapa angka yang ditunjukkan dalam bagian 2.1 tampak rendah jika dibandingkan dengan target Kerangka Hasil Bersama (*JRF-Joint Result Framework*) 2012, angka-angka tersebut mencerminkan sifat uji coba dari kegiatan dan kompleksitas sistem yang akan diterapkan sebelum dapat digulirkan secara nasional. Secara khusus, kebutuhan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dan uji coba rancangan dari setiap program pelatihan memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Sebaliknya, banyak peserta dilaporkan mengikuti pelatihan pengelolaan BOS yang berupa proses pelatihan singkat (3 peserta per sekolah selama 3 hari) dan jumlah tersebut mencerminkan satu hasil independen yang tidak mungkin direproduksi dengan dana EP. Hal ini menunjukkan keterbatasan target JRF, yang sifat kuantitatifnya tidak dapat menangkap cakupan dan karakteristik fokus pembangunan kapasitas yang signifikan yang diberikan melalui SSQ. Komentar tambahan tentang kegiatan C2 adalah sebagai berikut:

- Komitmen pemangku kepentingan pada sejumlah elemen kegiatan di bawah C2 semakin terlihat jelas. Misalnya, 9 kabupaten (dari 170 yang termasuk dalam tahap uji coba) mendanai

pelaksanaan program pelatihan PPP mereka sendiri. Demikian pula, suatu penilaian independen yang dilakukan terhadap pelatihan BOS yang didanai EP telah menunjukkan bahwa pelatihan langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan tentang BOS dan praktik pengelolaan sekolah, dengan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah yang tampaknya menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan. Sebagai bukti jangkauannya yang semakin luas, 16 dari 23 kabupaten yang mulanya tidak menerima pelatihan BOS pada tahap awal saat ini berpartisipasi dalam program pelatihan, yang dalam hal ini Kemendikbud berusaha memastikan bahwa kabupaten-kabupaten di Papua juga merasakan manfaatnya.

- Pencapaian ini harus menjadi perhatian dengan mempertimbangkan kecepatan dan sumber daya. Komitmen Kemendikbud pada sistem CPD, yang digambarkan melalui pernyataan publik Mendikbud tentang aksesibilitas sistem CPD bagi semua kepala sekolah pada akhir tahun 2013, menyajikan tantangan bagi konsistensi dan kualitas pencapaian. Terdapat indikasi bahwa beberapa peserta pelatihan (misalnya, pejabat DEO / PEO yang berpartisipasi dalam pelatihan HRM/D) melaporkan pemahaman yang minim tentang bagaimana menerapkan pengetahuan baru mereka, yang menunjukkan ancaman bagi pencapaian tingkat yang lebih tinggi dari EOPO 2. Kondisi ini diperburuk dengan risiko yang terkait dengan pengalihan tanggung jawab pengelolaan sistem pelatihan dari SSQ ke Pusbang Tendik Kemendikbud pada April 2013. Risiko-risiko yang sama juga memberikan peluang kelembagaan jangka panjang di sektor pendidikan di Indonesia seandainya sistem penguatan yang diperlukan terwujud dan dijadikan sumber daya yang tepat di tahun-tahun berikutnya.
- Dari perspektif pengawasan dan monitoring eksternal, terdapat suatu kebutuhan bagi para pemangku kepentingan EP untuk mengartikulasikan perubahan yang diharapkan dalam hal pengetahuan, sikap dan praktik pada fase pasca-pelatihan, untuk melihat relevansi dan efektivitas dukungan EP serta untuk memetakan, memahami dan memanfaatkan dengan lebih baik perubahan sistemik yang lebih luas dalam lembaga masing-masing.

2.4 EOPO 3: Meningkatnya Kualitas Madrasah Sejalan Dengan SPN

EOPO 3 sejalan dengan komitmen kebijakan Kemenag untuk mendukung Madrasah sebagai penyelenggara pendidikan alternatif bagi anak-anak Indonesia. Serupa dengan C2, prinsip yang mendasari kegiatan C3 adalah perubahan pendekatan Kemenag. Khususnya pada C3, terdapat perubahan sebagai hasil didorongnya akreditasi berdasarkan target kuantitatif menjadi pendukung peningkatan kemampuan madrasah dalam memberikan layanan pendidikan yang nantinya akan menghasilkan akreditasi BAN-S/M. Ini merupakan perubahan yang mendasar karena berarti pusat perhatian telah bergeser dari akreditasi menjadi peningkatan kualitas.

Hingga saat ini kegiatan C3 ditandai dengan pelaksanaan kegiatan yang berkecepatan tinggi dan timbulnya minat Kemenag pada model dukungannya (misalnya, Kemenag menunjukkan minatnya pada model MDC, MoU antara BAN-S / M dan Kemenag, dan pendanaan struktural yang disediakan untuk akreditasi Madrasah). Meskipun kapasitas Kemenag di tingkat daerah masih belum merata, komitmen ini juga berlanjut di tingkat provinsi dan kabupaten yang ditandai dengan, misalnya, beberapa pemerintah provinsi telah memberikan hibah untuk madrasah dan mulai merevitalisasi MDC secara mandiri tanpa bantuan dari SSQ. Meskipun tanda-tanda ini menggembirakan, masih terlalu dini untuk menilai dampak dari hibah Madrasah dan dukungan Mitra Pelaksana Daerah pada tingkat kualitas madrasah yang dibandingkan dengan SPN dan standar akreditasi.

Mengingat tujuan tingkat tinggi yang serupa – meski fokus berbeda – tim implementasi SSQ pada C2 dan C3, setelah periode awal pembentukan dan pendirian, saat ini aktif membangun hubungan (misalnya, dengan berbagi materi pelatihan) sehingga dapat mengoptimalkan minat, momentum dan dukungan.

2.5 EOPO 4: Penggunaan Temuan Riset Oleh Pembuat Kebijakan Untuk Menginformasikan Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran Sektor Pendidikan

Meskipun EOPO 4 masih relevan pada konteks sektor pendidikan di Indonesia, terdapat pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara menuntut bukti dan menggunakan bukti. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor terkait pembuatan kebijakan ekonomi dan politik yang kompleks, yang sulit untuk diidentifikasi dan dikendalikan. Perbedaan ini juga mengancam kegunaan produk penelitian ACDP jika tidak disebarluaskan dan disosialisasikan secara tepat untuk mencapai serapan.

Di samping itu, terdapat peningkatan apresiasi terhadap perbedaan antara mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi keputusan yang menafsirkan, mengoperasikan dan melaksanakan kebijakan dan strategi. EP - disengaja atau tidak - tampaknya aktif di kedua hal tersebut, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda sejauh ini:

- Melalui dukungannya terhadap ACDP, C4 secara langsung menargetkan perbaikan kebijakan melalui penyediaan produk pengetahuan bagi pengambil keputusan di Kemenag, Kemendikbud, Bappenas dan Kemendagri. Produk pengetahuan ini disampaikan sebagai bentuk tanggapan atas permintaan dan dengan harapan bahwa temuan dan rekomendasi akan dimanfaatkan. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa model tersebut berfungsi, sebagian besar karena terbatasnya jumlah studi yang berhasil diselesaikan (3 penelitian pada akhir 2012). Pada saat yang sama, kekhawatiran mengemuka mengenai kemampuan ACDP untuk mengatasi kendala sistemik dalam proses kebijakan, perencanaan dan penganggaran:
 - Waktu untuk proses pengadaan dan penyampaian ACDP tampaknya membatasi kesempatan untuk menawarkan perubahan yang cepat dalam menanggapi jendela kebijakan tertentu.
 - Model ACDP terutama berfokus pada penyampaian hasil penelitian, meskipun tidak secara eksklusif (misalnya, pelatihan IPDET bagi para pejabat Kemendikbud). Penggunaan produk pengetahuan dan kegiatan lainnya masih terbatas dan peningkatan jumlah opsi tanggapan akan bermanfaat bagi berbagai macam kebutuhan.
 - Meskipun ACDP tidak dimaksudkan untuk dilakukan melalui integrasi penuh dengan komponen-komponen EP lainnya, terdapat sejumlah bukti yang terbatas mengenai adanya pembelajaran dan temuan berbasis praktik dari EP yang menyerap produk ACDP, dan sebaliknya pembuat kebijakan yang terlibat dalam EP menuntut produk pengetahuan dari ACDP.
 - Dari perspektif pengawasan dan monitoring eksternal, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi, memantau dan melaporkan terkait perubahan menengah yang diharapkan dalam kerangka logika C4, misalnya perubahan yang diharapkan dalam hal pengetahuan, sikap dan praktik yang diharapkan pemangku kepentingan program pada berbagai tahap dan asumsi kritis yang mendasari logika tersebut.

- Melalui kegiatan dasar tiga komponen lainnya (C1, C2 dan C3), EP telah efektif dalam mempengaruhi keputusan di tingkat pelaksanaan. Hal ini sebagian disebabkan keahlian teknis tim pelaksana komponen, hubungan mereka dengan rekan mereka dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan merespon peluang dengan cepat. Terdapat banyak contoh keputusan counterparts yang dipengaruhi oleh EP (lihat
- Tabel 2 di bawah), dengan tim EP yang memainkan peran signifikan atau hanya peran yang memberikan saran, sehingga menekankan kesempatan yang ada pada peran mereka.

Tabel 2: Keputusan rekanan yang dipengaruhi EP

C	Contoh keputusan yang dipengaruhi tim EP
1	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi biaya unit proses pembangunan oleh Kemen PU • Keputusan mengenai ambang batas APK : perlu melihat bukti perubahan ambang batas • Penghapusan ambang batas belanja 90% untuk pencairan <i>tranche</i> 2
2	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan paradigma menuju sistem pelatihan berbasis kompetensi • Pendekatan pedagogik pembelajaran isi CPD secara online • Perlu memperkuat peran pelatihan pengawas
3	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan paradigma menuju kualitas • Ketertarikan Kemenag pada model dukungan MDC • Peraturan pengawas berbasis kompetensi dari Kemenag

3 Bagaimana Hasil-hasil Tersebut Dicapai?

Bagian ini membahas bagaimana hasil-hasil yang disajikan pada bagian sebelumnya itu berhasil dicapai. Bagian ini juga menyajikan komentar mengenai mekanisme penyampaian yang dimanfaatkan seluruh komponen, mempertimbangkan konsep "kemitraan", dan membuat sejumlah penilaian luas mengenai keberlanjutan.

Meskipun awalnya tujuan desain EP adalah agar keempat komponen tersebut saling melengkapi, komponen-komponen tersebut masih belum menunjukkan sinergi untuk berkontribusi pada tingkat yang lebih tinggi dalam Teori Perubahan. Keempat komponen tersebut dapat dianggap sebagai prakarsa terpisah yang berinteraksi dengan prakarsa-prakarsa lain di luar kemitraan untuk mencapai sasaran EP dan berkontribusi pada visi yang telah dinyatakan.

3.1 Mekanisme Pelaksanaan

3.1.1 Modalitas

Modalitas bantuan merupakan cara-cara di mana bantuan disediakan oleh donor untuk mitra pemerintah. Modalitas dapat berupa proyek melalui pendekatan sektoral dan dukungan anggaran umum, yang meliputi berbagai pengaturan untuk persyaratan dan akuntabilitas.

Salah satu karakteristik EP adalah kombinasi sejumlah modalitas bantuan yang terhubung dengan satu benang merah: komitmen untuk memperkuat sistem nasional dalam penyediaan layanan pendidikan. Kombinasi beberapa modalitas - termasuk dukungan alokasi anggaran (C1, C2), dukungan proyek (C3), dan dukungan multi-donor (C4) - mencerminkan, antara lain, kapasitas mitra dan tingkat kematangan hubungan antar-pemerintah, yang pada saat yang sama memungkinkan tekanan akuntabilitas yang sehat. Pada prinsipnya, perpaduan modalitas ini merupakan respon yang tepat dan sesuai yang tampak menawarkan peluang baik untuk membangun kapasitas melalui pengembangan sistem, suatu perpaduan yang juga memungkinkan AusAID untuk mengubah taktiknya - modalitasnya - sementara tetap mempertahankan strategi yang luas mengenai peningkatan hasil pendidikan.

Dengan beroperasi melalui sistem Pemerintah Indonesia, EP memanfaatkan keunggulan komparatif utama berupa skala dan efisiensi, ketika kegiatan monitoring dan pembangunan kapasitas yang dijalankan kontraktor AusAID menawarkan respons yang tepat terhadap risiko dan kebutuhan akan akuntabilitas.

Namun, berbagai modalitas yang digunakan pada komponen yang berbeda (ditambah dengan sejumlah mekanisme pelaksanaan yang berbeda yang dijelaskan di bawah) hanya dapat menekankan adanya risiko bahwa berbagai komponen beroperasi secara terpisah dan bahwa kemitraan beroperasi sebagai empat prakarsa yang mandiri. Sebenarnya hal itu bukan masalah asalkan prakarsa pendukung (non EP) lainnya yang akan berpadu dengan empat komponen untuk mencapai hasil dan tujuan yang lebih tinggi dapat diidentifikasi dan pelaksanaannya dimonitor.

3.1.2 Mekanisme Implementasi

EP juga menargetkan dan menggunakan beberapa mekanisme implementasi di tingkat lapangan. Mekanisme tersebut merupakan sistem nasional yang ditargetkan EP, yang dipilih berdasarkan asumsi bahwa mekanisme tersebut berpeluang menghasilkan keberhasilan tertinggi dalam mencapai dan mempertahankan keluaran dan hasil di tingkat komponen. Tabel 3 mengidentifikasi mekanisme atau sistem implementasi yang relevan untuk setiap komponen dan juga menggambarkan karakteristik dan tantangannya masing-masing.

Tabel 3: Mekanisme implementasi tingkat komponen

Sistem yang akan memperkuat	Hasil pengamatan utama
C1: Sistem pembangunan berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sejarah panjang akan penggunaan oleh Pemerintah Indonesia (7.700 sekolah sudah dibangun) dan merupakan mekanisme yang sudah terbukti berhasil • Dianggap sebagai mekanisme yang lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan kontraktor swasta, dengan manfaat yang terkait berupa komitmen masyarakat • Manfaat kemitraan bertambah dengan proses monitoring - SSQ -

	<p>eksternal yang menerapkan "tekanan sehat".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dianggap sebagai mekanisme tingkat pembangunan yang tepat⁵ (dana melalui Pemerintah Indonesia dengan monitoring eksternal) mengingat risiko-risiko yang dihadapi.
C2: Sistem pengembangan profesional berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sejumlah mekanisme pemberian pelatihan yang berbeda sedang diuji coba. Ada keinginan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam mekanisme pelaksanaan sehingga sistem berkembang dalam sistem pendidikan • Komitmen Pemerintah Indonesia pada CPD jelas dan penyampaian modul pendidikan secara on-line akan dimanfaatkan. Namun, pertimbangan pedagogik terkait dengan perubahan menjadi penyampaian secara on-line perlu dinilai dan ditangani
C3: Sistem akreditasi berbasis kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan paradigma menuju sistem akreditasi berbasis kualitas mulai terlihat, tetapi diperlukan bukti kuat bahwa Kemenag sepenuhnya mengadopsi "model" yang relevan. • Pendanaan yang diberikan langsung untuk Madrasah dan Mitra Pelaksana Daerah/SNIP secara logistik rumit tapi tetap merupakan mekanisme yang paling efektif
C4: Sistem pengambilan kebijakan berbasis bukti	<ul style="list-style-type: none"> • ACDP banyak menggunakan mekanisme respon tunggal untuk tuntutan yang kompleks • Proses pengadaan yang panjang yang membatasi respon dan (mempengaruhi) ketepatan waktu

3.2 Kemitraan

Dengan diberi label sebagai "kemitraan", EP lebih tepat mencerminkan suatu filosofi, maksud atau komitmen. Keinginan AusAID untuk sebisa mungkin bekerja melalui sistem pemerintah Indonesia merupakan gambaran komitmen tersebut, dan komitmen ini membutuhkan hubungan yang matang dan saling percaya serta kepemilikan bersama atas keberhasilan dan kegagalan. Bagi Pemerintah Australia, kemitraan yang bermakna memungkinkan keterlibatannya dengan Pemerintah Indonesia di tingkat kebijakan dan operasional. Kemitraan juga memberikan ruang untuk mempengaruhi, dan menawarkan legitimasi, cakupan dan posisi yang lebih baik. Bagi Pemerintah Indonesia, kemitraan ini menawarkan kredibilitas, kepentingan dan profil internasional yang lebih baik.

Meskipun Pemerintah Indonesia dan Australia dengan tepat menganggap diri mereka sebagai mitra strategis, di tingkat praktis hubungan operasional yang utama terjalin di antara lembaga-lembaga dan individu-individu yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Meskipun hubungan antara dua mitra ini (Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia) memiliki landasan yang baik, ketergantungan yang berlebihan pada sejumlah individu penting harus dilihat sisi kelebihannya (misalnya, adanya posisi tawar yang kuat) dan sisi kelemahannya (yaitu, terjadinya kekosongan jika individu tersebut dipindahtugaskan). Jelas terlihat bahwa hubungan kerja yang kokoh berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat akan langgeng, sehingga memungkinkan, pada tingkat teknis, adanya

⁵ Empat tahapan di sepanjang kontinum diidentifikasi sebagai: 1. Pembangunan yang didanai donor dan dilaksanakan Kontraktor Pelaksana; 2. Pembangunan dilaksanakan masyarakat dan didanai melalui dan dimonitor Kontraktor Pelaksana; 3. Pembangunan dilaksanakan masyarakat dan didanai melalui sistem Pemerintah dimonitor Kontraktor Pelaksana; dan 4. Pembangunan dilaksanakan masyarakat dan didanai melalui dan dimonitor by sistem Pemerintah.

promosi dan adopsi pendekatan baru, yang akan sulit terwujud jika tidak terdapat hubungan yang kokoh.

Oleh karena itu, EP merupakan program dengan banyak sisi yang dipimpin Pemerintah Indonesia dan AusAID dan melibatkan banyak kemitraan dan hubungan di tingkat operasional yang lebih rendah. Seperti yang mungkin tersirat, kualitas dan frekuensi kerja sama dan keterlibatan dengan serta antara tataran senior tata kelola program seringkali tidak konsisten dan sulit diwujudkan. Kepemimpinan Pemerintah Indonesia pada EP mengalami difusi yang tidak dapat dihindari mengingat luasnya program dan manajemen senior AusAID pada EP tampak kekurangan sumber daya ketika mempertimbangkan nilai finansial dan kepentingan politik yang dikaitkan dengan program.

Selain itu, berbagai mekanisme tata kelola (Kelompok Pengawasan Tata Kelola, Kelompok Pengawasan Teknis (TOG) Prasarana, TOG Pengembangan Staf, TOG Akreditasi Pesantren dan TOG ACDP), yang dipadukan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita pengelolaan dalam kemitraan rupanya kurang dan masih belum dimanfaatkan dengan optimal, atau setidaknya belum secara efektif digunakan untuk penilaian / pengelolaan kinerja.

3.3 Keberlanjutan

Mekanisme penyampaian EP belum tentu berkelanjutan, karena mekanisme tersebut seringkali dibuat terbatas dan hanya untuk menyampaikan kegiatan dengan waktu terbatas dalam program tertentu. Namun, adanya ambisi yang jelas dalam EP untuk memfasilitasi perubahan sistemik yang akan mewujudkan manfaat EP yang tetap relevan hingga jauh setelah kemitraan tersebut berakhir. Ambisi ini mengharuskan pemangku kepentingan program untuk bertanya: apa yang kita - EP - ingin tinggalkan dan apakah kita sudah berada di jalur yang tepat untuk merealisasikan ambisi tersebut? Sama pentingnya, program juga harus mempertimbangkan 'Siapa yang menjalankan?' dan 'Siapa yang membiayai?' pada saat dimulainya program dan dalam kaitannya dengan visi program untuk 2016. Dengan demikian, keberlanjutan harus dilihat sebagai prinsip pedoman dan bukan sesuatu yang diterapkan hanya melalui pemindahan tanggung jawab selama pelaksanaan atau dengan bekerja dalam sistem kemitraan.

Meskipun terlalu dini untuk memberikan komentar dengan pertimbangan matang tentang kemungkinan keberlanjutan berbagai prakarsa yang didukung EP, pemangku kepentingan EP perlu untuk terus mengidentifikasi dan meninjau kemungkinan ancaman atau risiko terhadap manfaat yang berkelanjutan. Tabel 4 berisi daftar potensi ancaman yang diidentifikasi selama proses APPR dan layak dipertimbangkan lebih lanjut:

Tabel 4: Potensi ancaman berdasarkan komponen terhadap keberlanjutan

C	Potensi ancaman terhadap keberlanjutan
C1	Kabupaten yang ditargetkan untuk pembangunan sekolah diminta untuk menandatangani Nota Kesepakatan (MoA) dengan Kemendikbud yang mencakup, antara lain, penyediaan staf pengajar untuk sekolah baru dan komitmen untuk memelihara sekolah di masa depan. Meskipun MoA tersebut ditandatangani dengan itikad baik, kapasitas kabupaten untuk dapat memenuhi komitmen masih belum merata, sehingga berpotensi menurunkan kualitas.

C2	Pelaksanaan kegiatan CPD akan "diserahkan" kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah pada awal 2013. Masih ada kekhawatiran tentang kapasitas Pusbang Tendik dalam melaksanakan program pelatihan yang pada saat ini sedang dirancang. Pada intinya, kualitas mungkin akan dikorbankan dalam menanggapi tekanan terkait kompleksitas, skala dan kerangka waktu politik.
C3	Terdapat tanda-tanda yang menggembirakan dari Kemenag yang "berkomitmen" dengan model SNIP/Mitra Pelaksana Daerah yang mendukung peningkatan kualitas Madrasah melalui komitmen anggaran. Meskipun masih terlalu dini untuk sepenuhnya menilai keberhasilan model ini, keberlanjutan yang pada akhirnya diraih dapat mengalami gangguan karena modalitas bantuan berupa proyek yang saat ini diadopsi dan hanya ada sedikit bukti bahwa strategi keberlanjutan memang dipertimbangkan.
C4	ACDP telah dirancang untuk memberikan bukti yang kuat untuk memfasilitasi perbaikan kebijakan; tetapi ACDP belum dirancang untuk membangun sistem kapasitas untuk menuntut, menghasilkan, menafsirkan atau menggunakan bukti. Meskipun bukti-bukti tersebut, ketika dihasilkan dan jika digunakan untuk mengembangkan kebijakan, harus mengarah pada hasil yang berkelanjutan, sistem itu sendiri masih belum berkelanjutan.

4 Siapa Yang Menikmati Hasilnya?

4.1 Penerima Manfaat

EP belum memiliki identifikasi yang disepakati mengenai target penerima EP. Dengan demikian, sulit untuk membuat penilaian mengenai seberapa sukses EP dalam mencapai kelompok target yang direncanakan. Namun, tampaknya tak terelakkan bahwa penerima manfaat yang sebenarnya akan bervariasi sesuai dengan komponen dan sesuai dengan tingkatan dari logika program yang dipertimbangkan. Dengan latar belakang semacam ini, penerima manfaat dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis:

- Penerima manfaat langsung: pelaksana sistem (misalnya, Kemendikbud, LPPKS, Kemenag, Mitra Pelaksana Daerah, Puslitjak)
- Penerima manfaat perantara: penyedia layanan (misalnya, Panitia Pembangunan Sekolah (SCC), peserta pelatihan, Madrasah, pembuat kebijakan)
- Penerima akhir: penerima pendidikan (misalnya, siswa)

Sifat dan waktu dari dampak juga akan berbeda:

- Kemungkinan dampak dalam jangka pendek pada pelaksana sistem
- Potensi dampak dalam jangka menengah pada penerima manfaat sistem
- Dampak jangka panjang yang dimaksudkan pada siswa, kemungkinan akan sulit untuk diukur selama program masih berjalan

4.2 Kelompok Rentan

EP tidak memiliki strategi inklusi sosial yang jelas, sebagai akibat tidak dimasukkannya strategi tersebut dalam desain akhir, terlepas dari kenyataan bahwa begitu besar perhatian yang diberikan untuk strategi tersebut selama proses desain. Saat ini, EP mengasumsikan adanya korelasi antara maksud EP dengan tujuan inklusi sosial. Misalnya, dengan menargetkan kabupaten dengan APK rendah,

diasumsikan bahwa EP menargetkan kemiskinan; dengan menargetkan peningkatan standar di madrasah, diasumsikan bahwa EP berfokus pada bagian miskin dari masyarakat; dan lebih luas lagi, dengan menargetkan perbaikan dalam pendidikan, EP memberikan kontribusi dalam penurunan kemiskinan.

Serupa dengan hal di atas, pertimbangan yang relatif sederhana terhadap isu-isu inklusi sosial telah dicatat selama pelaksanaan, misalnya dengan adanya lajur khusus pengguna kursi roda, toilet, data terpilah. Meskipun ada keinginan yang jelas untuk mengatasi masalah pengucilan sosial dan memberikan manfaat kepada kelompok rentan, masih terjadi kurangnya pemahaman tentang bagaimana melakukannya. Meskipun demikian, niat terpuji telah ditunjukkan oleh SSQ dalam memasukkan inklusi sosial ke dalam kerangka kerja M & E mereka.

AusAID telah menerima tidak adanya strategi inklusi sosial pada desain EP dan mengupayakan dokumen lainnya (yang saat ini sedang dikembangkan) dengan tujuan akhir menambahkan strategi inklusi sosial pada desain EP. Perlu dicatat bahwa data yang tersedia mengenai kelompok rentan masih terbatas, yang jadi pencerminan prioritas Pemerintah Indonesia yang rendah terhadap isu ini.

5 Apa Implikasinya?

Tabel 6 dan 7 merangkum implikasi yang disimpulkan dari bagian-bagian sebelumnya. Implikasi ini disusun dalam bentuk temuan dan rekomendasi yang terkait. Setiap rekomendasi disertai dengan kelompok sasaran yang dapat diberi tanggung jawab utama untuk pelaksanaan dan sistem peringatan berwarna yang menunjukkan kedekatan relatif dari isu-isu sebagai berikut:

Tabel 5: Sistem peringatan

Warna	
Oranye	Direkomendasikan segera melakukan tindakan.
Ungu	Direkomendasikan segera melakukan pertimbangan dengan tindakan yang dijadwalkan dengan tepat.
Hijau	Direkomendasikan melakukan pertimbangan dengan tindakan yang tepat pada waktunya.

Tabel 6: Implikasi pada level EP

Temuan	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama
Desain		
Kemungkinan penekanan RENSTRA ke depan pada infrastruktur pendidikan dan lingkungan pengajaran untuk pendidikan dasar 12 tahun (lihat §1.1)	R1: Membuat pertimbangan relevansi tujuan EP dalam kaitannya dengan RENSTRA ke depan	AusAID
Target JRF sedang dievaluasi kembali, dengan beberapa perubahan kecil yang diharapkan dalam waktu dekat (lihat §1.1)	R2: Mempertimbangkan relevansi tujuan EP dalam kaitannya dengan target JRF yang baru	AusAID
Pengetatan anggaran di Kemendikbud pada bidang dampak dari sektor yang didukung EP, misalnya Infrastruktur JSE (lihat §1.1)	R3: Memonitor anggaran untuk bidang dukungan EP yang penting melalui Laporan Keuangan Sektor Tahunan	POM
Kemungkinan tidak adanya penambahan dana donor di sektor pendidikan akan berdampak pada pentingnya EP (lihat §1.1)	R4: AusAID dan Pemerintah Indonesia perlu mengadakan negosiasi terkait penghapusan prinsip non-additionality pada dana EP	AusAID
Monitoring anggaran belanja dan pendidikan kabupaten menjadi semakin penting (lihat §1.2)	R5: Meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan pendidikan di tingkat kabupaten, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi risiko efek substitusi pendanaan di tingkat kabupaten	AusAID/POM
Prioritas dan program donor baru di sektor pendidikan menciptakan peluang sekaligus ancaman bagi EP (lihat §1.3)	R6: Memperkuat teori perubahan EP untuk menyertakan pemetaan yang komprehensif atas prakarsa donor yang ada dalam pendidikan dan posisi relatif EP	AusAID
Penggunaan modalitas dan mekanisme penyampaian yang berbeda menimbulkan risiko bahwa kemitraan beroperasi sebagai empat prakarsa yang tidak saling berhubungan (lihat §3.1.1)		
Belum adanya identifikasi target penerima manfaat EP membuat	R7: Menyetujui suatu klasifikasi penerima manfaat dan	AusAID

Temuan	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama
penilaian tentang keberhasilan EP sulit dilakukan (lihat §4.1)	identifikasi harapan dampak yang realistis	
Belum adanya strategi inklusi sosial yang jelas berarti tujuan inklusi sosial tidak diidentifikasi dan tidak dapat dimonitor (lihat §4.2)	R8: Membuat , mensosialisasikan dan menerapkan strategi inklusi sosial EP, termasuk mekanisme untuk menilai pelaksanaannya	AusAID / POM
Data kelompok rentan yang tersedia terbatas, yang mungkin mencerminkan prioritas Pemerintah Indonesia yang rendah (lihat §4.2)		
Pengelolaan		
Manajemen senior AusAID pada EP kekurangan sumber daya dan hal ini mengancam kualitas dan frekuensi keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program (lihat §3.2)	R9: Memperkuat pengelolaan EP dengan peningkatan sumber daya manajemen senior AusAID yang memiliki gambaran keseluruhan dan tanggung jawab tentang EP	AusAID
Mekanisme tata kelola EP (GOG dan TOG) belum dimanfaatkan secara efektif dalam hal penilaian / pengelolaan kinerja (lihat §3.2)	R10: Memperkuat mekanisme tata kelola EP untuk menjamin pengelolaan kinerja EP yang proaktif	Pemerintah Indonesia /AusAID
Pengawasan dan Monitoring Kinerja		
Minimnya target atau tahapan pencapaian (<i>milestones</i>) di sepanjang jalur perubahan yang diharapkan mengakibatkan kemajuan EP sulit diukur (lihat §2.0)	R11: Mendiskusikan dan menyepakati Teori Perubahan EP, untuk kemudian menyertakan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Asumsi yang jelas tentang setiap langkah dari logika EP • Hasil yang diharapkan yang jelas dan terukur untuk setiap langkah dari logika EP melalui identifikasi tahapan pencapaian kinerja (<i>performance milestones</i>) 	POM / AusAID / SSQ / Pemerintah Indonesia
Belum ada identifikasi ancaman atau risiko terhadap manfaat EP yang berkelanjutan (lihat §3.3)	R12: Melakukan konsolidasi teori perubahan EP, untuk menyertakan suatu daftar risiko yang komprehensif di tingkat EP	AusAID / POM

Tabel 7: Implikasi pada tingkat Komponen

Temuan	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama
Komponen 1		
Membangun tambahan ruang kelas dan / atau merenovasi ruang kelas yang ada pada fasilitas yang sudah ada pada saat ini berpotensi menjadialternatif yang efektif untuk mencapai tujuan C1 (lihat §2.2)	R13: Melakukan diversifikasi terhadap pendekatan C1 dalam meningkatkan akses dan pada saat yang sama tetap fokus pada penyediaan infrastruktur, misalnya dengan mendukung rehabilitasi sekolah dan/atau penambahan ruang kelas.	AusAID/ Pemerintah Indonesia
Kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam siklus pembangunan C1 berikutnya merupakan ancaman terhadap pencapaian target akhir program (lihat §2.2)	R14: Melaksanakan peninjauan kembali terhadap target pembangunan dengan mempertimbangkan kerangka waktu dan kapasitas/kemampuan saat ini	AusAID/ Pemerintah Indonesia
Minimnya jumlah proposal yang memenuhi syarat yang diajukan pada siklus pembangunan pertama C1 menghambat penerapan kriteria seleksi secara ketat (lihat §2.2)	R15: Meminta dilakukannya suatu penelitian untuk memahami faktor-faktor tidak adanya pengajuan proposal dari kabupaten dan identifikasi langkah-langkah perbaikan	AusAID/ POM
Kriteria pemilihan lokasi harus ditinjau-ulang dan dipertajam - misalnya kriteria APK (lihat §2.2)	R16: Meninjau kembali proses pemilihan kabupaten dan lokasi, agar dapat menyertakan transisi dari SD ke SMP sebagai salah satu kriteria	AusAID / Pemerintah Indonesia
Kapasitas kabupaten yang tidak merata dalam memenuhi MoA mempengaruhi keberlanjutan capaian C1 (lihat §3.3)	R17: Melakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kabupaten serta untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil dalam rangka mengembangkan kapasitas kabupaten dalam memenuhi kewajiban mereka yang tertera di dalam MoA	AusAID/ POM
Terdapat keinginan yang kuat untuk membahas kemungkinan keterlibatan <i>field monitor</i> SSQ dalam proses pembangunan sekolah (lihat §2.2)	R18: Meninjau dan memperjelas peran <i>field monitor</i> terkait peningkatan peranan mereka di dalam proses konstruksi	AusAID / Pemerintah Indonesia / SSQ

Temuan	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama
Komponen 2		
Beberapa peserta pelatihan melaporkan pemahaman yang minim tentang bagaimana menerapkan pengetahuan baru mereka, yang menunjukkan ancaman bagi pencapaian EOPO 2 (lihat § 2.3)	R19: Mengidentifikasi langkah-langkah perantara dalam kerangka logis C2 yang memaparkan perubahan yang diharapkan terkait pengetahuan peserta, sikap dan praktik pada fase pasca-pelatihan, dengan mekanisme untuk mengevaluasi pencapaian program terhadap apa yang sebelumnya diharapkan	SSQ
Komitmen Kemendikbud pada hasil CPD menyebabkan terbatasnya waktu yang tersedia untuk dapat menerapkan sistem tersebut secara nasional (lihat § 2.3)	R20: Menetapkan proses monitoring yang kokoh atas implementasi perjanjian hibah C2, yang terdiri atas <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan pencapaian dan target yang jelas • Fungsi pendukung yang jelas untuk SSQ • Tindakan remedial yang perlu dilakukan seandainya monitoring mengindikasikan kegagalan dalam pelaksanaan. 	AusAID / SSQ / Pemerintah Indonesia
Pengalihan tanggung jawab pengelolaan sistem CPD dari SSQ ke Pusbang Tendik Kemendikbud pada tahun 2013 membawa risiko sekaligus peluang kelembagaan dalam jangka panjang (lihat § 3.3)		
Terdapat dorongan kuat untuk mengembangkan penyampaian sistem CPD secara on-line (lihat § 3.1.2)	R21: Menyesuaikan isi pedagogik materi pelatihan CPD untuk penyampaian secara on-line dan kembangkan keterampilan <i>e-learning</i> penerima manfaat	SSQ / Pemerintah Indonesia
Komponen 3		
Perubahan paradigma menuju sistem akreditasi berbasis kualitas sudah terlihat, namun diperlukan bukti kuat bahwa Kemenag memang telah sepenuhnya mengadopsi "model" yang relevan (lihat § 2.4)	R22: Monitor peluang dan hambatan dalam pengadopsian Model SNIP / MDC oleh KEMENAG	SSQ
Kualitas keberlanjutan pencapaian C3 dapat menurun karena model pelaksanaannya yang berbentuk proyek (lihat § 3.3)	R23: Mengembangkan strategi keberlanjutan untuk C3	SSQ / AusAID

Temuan	Rekomendasi	Penanggung Jawab Utama
Komponen 4		
Sejauh ini belum ada bukti bahwa model ACDP meningkatkan penggunaan bukti/hasil penelitian di kalangan pengambil kebijakan (lihat § 2.5)	R24: Mendorong strategi sosialisasi hasil penelitian dan memastikan dirancang serta dilaksanakannya sistem M & E yang kokoh oleh mitra pelaksana dan POM.	ADB/POM
Asumsi-asumsi penting yang mendasari logika C4 perlu diperjelas dan dilaporkan (see §2.5)	R25: Memperkuat logika program C4 untuk menyertakan asumsi dan perubahan yang diharapkan dalam hal pengetahuan, sikap dan praktik dari pembuat kebijakan terkait	AusAID/EC
Model kerja ACDP kebanyakanberfokus pada pelaksanaan studi penelitian dan menggunakan secara terbatas produk pengetahuan dan kegiatan lainnya (lihat § 2.5 dan 3.3 §)	R26: Mempertimbangkan seluruh mekanisme yang tersedia di ACDP dalam meresopn permintaan riset. Pertimbangkan untuk berdialog dengan <i>Knowledge Sector Initiative (KSI)</i> yang juga didanai oleh AusAID untuk berbagi pengalaman terkait upaya mendorong pembuatan kebijakan yang berbasis hasil penelitian (<i>evidence-based policy making</i>).	ADB / AusAID
Minimnya pembelajaran dan temuan-temuan dalam EP yang digunakan dalam produk-produk yang dihasilkan oleh ACDP, serta terbatasnya permintaan atas produk-produk pengetahuan yang dihasilkan oleh ACDPdari para pembuat kebijakan yang terlibat di dalam EP (lihat § 2.5)	R27: Menghimbau para pembuat kebijakan yang terlibat dalam EP untuk memanfaatkan ACDP dan untuk memasukkan pembelajaran dan temuan-temuan EP ke dalam kegiatan-kegiatan ACDP.	AusAID / SSQ

LAMPIRAN I

PROSES PERSIAPAN APPR

Laporan Tahunan Kemajuan Kemitraan (APPR)

Proses Produksi Standar

Kemitraan Pendidikan – Sistem Manajemen Kinerja (EP-PMS) menyampaikan sejumlah laporan yang memberikan bukti kinerja EP sebagai dokumen tersendiri. Dokumen ini juga akan menjadi masukan untuk proses analitis yang menghasilkan Laporan Tahunan Kemajuan Kemitraan.

Dokumen singkat ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam pembuatan APPR dan dapat dianggap sebagai tambahan operasional terhadap EP-PMS. Masing-masing dari keempat langkah ini dalam proses analitisnya dijabarkan di bawah ini berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; tanggung jawab untuk implementasi kegiatan; dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Langkah 1: Penyaringan Laporan EP

- **Kegiatan:** Setiap laporan yang berkaitan dengan kinerja EP yang diajukan dan/atau diterima oleh POM (lihat Lampiran 1) akan disaring melalui lensa kerangka analitis. Kerangka analitis distruktur berdasarkan serangkaian tema umum yang i) mencerminkan topik strategis untuk AusAID, ii) menyinggung komponen EP, dan iii) konsisten dengan kriteria AusAID mengenai Mutu Pelaksanaan (QAI). Setiap tema dijabarkan menjadi serangkaian pertanyaan utama dan sub-pertanyaan (lihat Lampiran 2). Informasi yang relevan dari laporan-laporan ini akan diambil dan dimasukkan ke dalam sel-sel yang tepat dalam matriks kerangka analitis, sehingga membentuk matriks analitis individu untuk masing-masing laporan. Akibatnya, tidak semua sel dari suatu matriks individu akan terisi, karena beberapa laporan hanya akan mengandung informasi yang berkaitan dengan tema tertentu. Karena ada sekitar 10-12 laporan yang akan diterima setiap tahun, diperkirakan akan dihasilkan 10-12 matriks analitis individu yang akan menjadi dasar informasi yang kuat untuk APPR. Sumber informasi tambahan akan dipertimbangkan jika dianggap perlu atau diminta oleh AusAID.
- **Tanggung jawab:** Tim POM bertanggung jawab untuk menyaring semua laporan berkaitan dengan kinerja EP dan memproduksi matriks-matriks individu yang terkait. Proses ini bisa difasilitasi dengan briefing oleh dan diskusi dengan penulis laporan yang relevan.
- **Waktu:** Matriks individu akan dihasilkan dalam satu bulan setelah disetujui/diterimanya suatu laporan, dan/atau paling lambat tanggal 31 Oktober tiap tahunnya.

Langkah 2: Mensintesis informasi berdasarkan tema

- **Kegiatan:** Semua matriks individu akan dikumpulkan dan informasinya akan dihimpun berdasarkan tema-tema yang umum. Ini berarti bahwa 10-12 matriks individu akan diringkas secara tahunan menjadi satu matriks (APPR) utuh yang distruktur berdasarkan tema analitis yang umum dan pertanyaan-pertanyaan utama. Matriks APPR ini akan besar dan sulit untuk dimanipulasi. Ringkasan dari semua informasi akan disiapkan untuk masing-masing tema umum dan dibagikan ke peserta lokakarya APPR tahunan (lihat langkah 3).
- **Tanggung jawab:** Tim POM bertanggung jawab untuk menghimpun semua matriks individu menjadi matriks APPR dan untuk mempersiapkan suatu ringkasan matriks yang mudah dimengerti untuk pihak-pihak yang relevan.

-
- **Waktu:** Matriks APPR dan ringkasannya akan siap dan dikirim pada minggu pertama November setiap tahunnya.

Langkah 3: Mengidentifikasi temuan kunci dan rekomendasi

- **Kegiatan:** Para pemangku kepentingan EP yang relevan akan berkumpul dalam lokakarya APPR tahunan untuk menganalisis informasi yang terkandung dalam matriks APPR dan ringkasannya. Sebelum lokakarya diselenggarakan, para peserta akan menerima ringkasan matriks APPR dan garis besar/agenda diskusi. Tujuan dari lokakarya ini adalah i) untuk menyetujui temuan-temuan untuk menjawab pertanyaan analitis utama; ii) untuk mengidentifikasi trend, pola dan kesenjangan informasi berkaitan dengan masing-masing tema umum; dan iii) untuk mengajukan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk masa depan investasi EP dan AusAID dalam sektor ini. Poin-poin penting dari diskusi lokakarya akan digarisbawahi dalam notulensi lokakarya.
- **Tanggung jawab:** Tim POM bertanggung jawab untuk mengorganisir dan memfasilitasi lokakarya APPR tahunan. Daftar peserta akan disetujui sebelumnya oleh AusAID dan akan mengikutsertakan perwakilan dari mitra pelaksana dan insititusi EP. POM akan bertindak sebagai sekretariat lokakarya dan membuat notulensi hasil diskusi yang akan digunakan untuk perumusan APPR.
- **Waktu:** Lokakarya APPR tahunan akan diselenggarakan dalam paruh pertama November tiap tahunnya.

Langkah 4: Menulis laporan

- **Kegiatan:** Berdasarkan kesimpulan diskusi pada lokakarya, draft APPR dibuat dan diserahkan kepada AusAID. Laporan ini akan menjabarkan temuan-temuan kunci berkaitan dengan kinerja EP dalam 12 bulan terakhir, yang distruktur seputar tema yang umum dan pertanyaan utama dari kerangka analitis (lihat Tabel dalam Lampiran 3). Laporan ini akan memasukkan juga kesimpulan dan rekomendasi target untuk memperbaiki pelaksanaan dan manajemen EP. Bagian temuan akan menjelaskan kinerja EP terhadap masing-masing tema analitis melalui presentasi bukti dan fakta, sedangkan bagian analisis akan bersifat lebih analitis, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung dan menghambat kinerja EP. Bagian rekomendasi akan mengajukan tindakan bertarget untuk keempat tujuan EP-PMS. APPR final akan memasukkan komentar dari pemangku kepentingan yang relevan dan diserahkan ke AusAID.
- **Tanggung jawab:** Tim POM bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyerahkan draft APPR. AusAID bertanggung jawab untuk memberikan komentar pada draft dokumen, setelah tim POM bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan menyerahkan laporan akhir.
- **Waktu:** Draft APPR akan diserahkan paling lambat tanggal 30 November setiap tahunnya. APPR final akan diserahkan tidak lebih dari dua minggu setelah menerima komentar-komentar yang relevan.

LAMPIRAN II

DOKUMEN EP YANG DITELAAH

No. Dokumen	Judul	Sumber
1	2011 Pelatihan BOS – Laporan Evaluasi	INSIST Yogyakarta
2	Review Satu Dekade mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan – Laporan Akhir	ACDP
3	Kemitraan di Bidang Pendidikan (EP)– Pemeriksaan Kesehatan #1	POM
4	Laporan Keuangan Sektor Tahunan	POM
5	Sistem and Kualitas Sekolah – Laporan Perkembangan Tahunan	SSQ

LAMPIRAN III

KERANGKA ANALITIS EP

#	Tema Umum	Pertanyaan Utama	Sub-pertanyaan	Sumber Utama Informasi
Tema-tema berkaitan dengan kriteria DAC				
1	Relevansi Kontekstual	Sejauh apa dan bagaimana intervensi EP sejalan dengan sektor pendidikan Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja isu yang ditanggapi oleh intervensi EP? • Seberapa penting isu-isu tersebut terhadap sektor? • Apakah AusAID memiliki keunggulan komparatif untuk menghadapinya? • Apakah intervensi EP menanggapi masalah-masalah yang baru muncul? 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Sektor • Pemeriksaan di Lapangan • Studi Evaluasi
2	Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia	Apa nilai tambah dari pendekatan kemitraan dalam menyampaikan EP?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja sisi positif dan negatif dari pendekatan kemitraan? • Apa nilai tambah dengan bekerja melalui sistem Pemerintah Indonesia? • Apakah intervensi EP melengkapi investasi Pemerintah Indonesia dalam sektor ini? • Apakah tanggung jawab mitra-mitra utama dijalankan secara efektif dan sungguh-sungguh? 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR • Analisis Tambahan • Laporan Monitoring • Audit
3	Mekanisme penyampaian	Sejauh mana mekanisme penyampaian EP bersifat efektif, efisien dan akuntabel?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja kelebihan dan kekurangan mekanisme penyampaian komponen? • Apakah dana Australia digunakan sesuai dengan tujuannya? • Apakah pengaturan koordinasi dan manajemen EP mendukung penyampaian intervensi secara seksama? • Apakah resiko berkaitan dengan penyampaian intervensi EP sudah dimitigasi dengan seksama? 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR • Laporan Monitoring • Audit
4	Keberlanjutan	Sejauh mana manfaat EP dapat terus bertahan melebihi masa program	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah keberlanjutan manfaat EP telah direncanakan dengan seksama dalam rancangan intervensi? • Apakah penghentian intervensi EP sudah disiapkan dan dikomunikasikan secara seksama? 	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Sekolah • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring

#	Tema Umum	Pertanyaan Utama	Sub-pertanyaan	Sumber Utama Informasi
		EP?	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah intervensi EP mendukung penguatan institusi secara seksama? • Apakah intervensi EP mendukung kepemilikan daerah secara seksama? 	
5	Dampak pada Penerima Manfaat	Bagaimana intervensi EP telah berdampak pada penerima manfaat?	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja penerima manfaat intervensi EP baik langsung maupun tidak langsung? • Apa saja dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan pada penerima manfaat? • Apakah dampaknya telah cukup untuk menjustifikasi investasi yang dilakukan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Survei Sekolah • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring
Tema-tema berkaitan dengan sasaran-sasaran EP				
6	Partisipasi dalam Pendidikan	Sejauh mana intervensi EP mempengaruhi partisipasi siswa dalam Pendidikan Setingkat SMP?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa bukti meningkatnya partisipasi dalam sekolah setingkat SMP? • Bagaimana intervensi EP mempengaruhi peningkatan partisipasi siswa dalam sekolah? <ul style="list-style-type: none"> ○ Apakah intervensi EP mempengaruhi motivasi dan insentif terhadap partisipasi siswa? ○ Apakah intervensi EP meningkatkan peluang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan tingkat menengah pertama? • Apakah kontribusi EP telah cukup untuk menjustifikasi investasi? 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Survei Sekolah • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring
7	Kualitas Pendidikan	Sejauh mana intervensi EP telah menyebabkan perbaikan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa bukti meningkatnya kualitas sekolah negeri dan swasta? • Bagaimana intervensi EP berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan? <ul style="list-style-type: none"> ○ Apa peran untuk meningkatkan kompetensi P dan S? ○ Apa peran untuk memungkinkan sekolah memenuhi rencana pembangunannya? • Apakah kontribusi EP telah cukup untuk menjustifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Survei Sekolah • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring

#	Tema Umum	Pertanyaan Utama	Sub-pertanyaan	Sumber Utama Informasi
			investasi?	
8	Tata Kelola Sektor	Sejauh mana intervensi EP telah mempengaruhi peningkatan penggunaan bukti untuk pengambilan keputusan dalam sektor pendidikan?	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja bukti mengenai peningkatan penggunaan bukti untuk pengambilan keputusan di sektor pendidikan? • Bagaimana intervensi EP mempengaruhi peningkatan penggunaan bukti untuk pengambilan keputusan di sektor pendidikan? • Apakah kontribusi EP telah cukup untuk menjustifikasi investasi? 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring
Tema-tema berkaitan dengan kelompok rentan target EP				
9	Gender	Sejauh mana EP telah mempromosikan kesetaraan gender dalam sektor pendidikan Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana intervensi EP mengurangi kesenjangan gender dalam sektor pendidikan Indonesia? • Apa saja dampak yang berbeda terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki akibat dari intervensi EP? • Apakah penyampaian intervensi EP sudah tepat secara konteks gender? • Apakah intervensi EP memfasilitasi peningkatan pemberdayaan dan suara perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Inklusi Sosial • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring

#	Tema Umum	Pertanyaan Utama	Sub-pertanyaan	Sumber Utama Informasi
10	Disabilitas	Sejauh mana EP telah mempromosikan pendidikan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia?	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah intervensi EP secara seksama dapat membuat penyandang disabilitas mengakses kesempatan yang sama untuk partisipasi, kontribusi dan pengambilan keputusan dalam sektor pendidikan Indonesia? • Apa saja dampak yang berbeda pada penyandang disabilitas akibat dari intervensi EP? 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Inklusi Sosial • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring
11	Pengentasan Kemiskinan	Sejauh mana EP telah meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin?	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah intervensi EP sudah menargetkan masyarakat miskin secara seksama? • Apa saja yang kita ketahui mengenai dampak yang berbeda pada masyarakat miskin akibat intervensi EP? • Apakah intervensi EP telah secara seksama memfasilitasi peningkatan pemberdayaan dan suara masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Inklusi Sosial • Studi Pemeriksaan di Lapangan • Studi Evaluasi • Laporan Monitoring

LAMPIRAN IV

DAFTAR NARASUMBER UTAMA

No. Wawancara	Target Wawancara	Tanggal, Jam
1	Julia Wheeler (AusAID) Isradi Alireja (AusAID)	Kamis, 22 November (0900-1100)
2	Sam Muller (SSQ)	Kamis, 22 November (1400-1600)
3	Meliana Istanto (AusAID) Bia Puspita (AusAID)	Jumat, 23 November (1000-1200)
4	Russell Keogh (SSQ C3) Robert Kingham (SSQ C3) Abdul Munir (SSQ C3)	Senin, 26 November (1000-1200)
5	Hetty Cislawski	Senin, 26 November (1400-1600)
6	Brian Spicer (SSQ C2) Roslyn Davis (SSQ C2) Alistair Douglas (SSQ C2)	Selasa, 27 November (1400-1600)
7	Irfani Darma (SSQ C1) Suluh Adiwibowo (SSQ C1) Jihad Saad (SSQ C1)	Rabu, 28 November (0900-1100)
8	Didik Suhardi (MOEC) Susetyo Widyasmoro (MOEC) Dedi Karyana (MOEC) Ahmad Zufar (MOEC) Kamin (MOEC)	Kamis, 29 November (0900-1100)
9	Hannah Birdsey (AusAID)	Kamis, 29 November (1400-1600)
10	Jo Dowling (AusAID) Jennifer Donohoe (AusAID)	Jumat, 30 November (1500-1700)
11	Bambang Indriyanto (MOEC)	Senin, 3 Desember (0900-1100)
12	Rohmat Muliana (MORA)	Selasa, 11 Desember (0900-1100)

Wawancara dilaksanakan oleh Nick Clinch, Laurent de Schoutheete dan Mauliyati Slamet dari POM.

LAMPIRAN V

TEORI PERUBAHAN EP

VISI		Meningkatnya penyampaian pelayanan pendidikan di Indonesia					
SASARAN		Meningkatnya partisipasi sekolah	Kualitas pendidikan meningkat di sekolah negeri dan swasta, termasuk Madrasah			Meningkatnya tata kelola sektor melalui peningkatan penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan	
EOPO		Meningkatnya pendaftaran Pendidikan setingkat SMP di kabupaten target	Membaiknya/meningkatnya tata kelola sekolah dan Madrasah			Kualitas Madrasah meningkat sejalan dengan SPN	Pembuat kebijakan menggunakan temuan riset untuk menginformasikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran
HASIL CAPAIAN/OUTPUT KOMPONEN		Meningkatkan ketersediaan sekolah di kabupaten target, memberikan kesempatan bagi semua	Meningkatkan kompetensi profesional kepala sekolah, supervisor dan pejabat pendidikan			Meningkatkan kapasitas Madrasah untuk memberikan pelayanan pendidikan	Temuan riset disebarkan dengan seksama
		Sampai dengan 2000 sekolah baru dibangun di kabupaten target menghasilkan sampai dengan 300,000 Sekolah setingkat SMP di lokasi-lokasi baru	Kepala sekolah, panitia sekolah, dinas pendidikan kabupaten /DEO dan anggota masyarakat dari sekolah yang baru dibangun diberi pelatihan dalam SBM	Kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten terkait dan anggota panitia sekolah diberi pelatihan mengenai penggunaan BOS	Kepala sekolah, supervisor, pejabat pendidikan kabupaten dan provinsi mendaftar dan berpartisipasi dalam sistem CPD	Memberikan peningkatan dukungan keuangan dan teknis ke Madrasah	Dihasilkannya riset berkualitas tinggi yang didasarkan pada permintaan
		Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud secara efektif menggunakan sistem pembangunan sekolah berbasis masyarakat	Dikembangkannya proses pelatihan SBM untuk sekolah-sekolah baru dibangun	Dikembangkannya proses pelatihan BOS untuk semua sekolah	Sistem CPD Nasional dibentuk dan diinstitutionalisasi, yaitu Kemendikbud mempunyai tanggung jawab tata kelola, sumber daya dan penjaminan mutu	Diperkuatnya sistem peningkatan kualitas Madrasah	Dihasilkannya sistem untuk merespon terhadap permintaan riset

LAMPIRAN VI
STANDAR M&E ECBP
STANDAR 3: PELAPORAN KEMAJUAN
INISIATIF

No	Fitur dari Laporan Kemajuan	Kepatuhan EP-APPR
3.1	Adanya ringkasan eksekutif yang menjelaskan informasi utama yang dibutuhkan untuk pelaporan QAI	Lihat Ringkasan Eksekutif
3.2	Aspek-aspek relevan dari konteks sudah dijelaskan dengan seksama	Lihat §1 (khususnya §1.1 dan §1.2)
3.3	Terdapatnya refleksi mengenai relevansi yang berlanjut dari capaian akhir program yang diharapkan	Lihat §1 (khususnya §1.3)
3.4	Dijelaskannya penilaian mengenai kemajuan menuju capaian akhir program yang berkelanjutan	Lihat §2.2 sampai §2.5
3.5	Dijelaskannya kualitas, jangkauan dan cakupan keluaran utama atau penyampaian untuk periode pelaporan	Lihat §2.2 sampai §2.5
3.6	Dijelaskannya kemajuan dalam mengimplementasi rencana tahunan	Tidak tersedia (diasumsikan laporan SSQ dan ACDP sudah mencakupnya)
3.7	Diberikannya suatu refleksi akan masukan terencana untuk memenuhi capaian akhir program yang diharapkan	Lihat §3
3.8	Dinilainya kemajuan terhadap anggaran	Belum selesai, walaupun manajemen keuangan dipertimbangkan di §3.1 dan §3.2.
3.9	Dinilai dan didemonstrasikannya efisiensi dan efektifitas manajemen utama atau sistem implementasi	Lihat Seksi §3.1 dan §3.2
3.10	Laporan menghasilkan keseimbangan yang adil antara pelaporan isu atau capaian positif maupun negatif	Kemandirian POM menghasilkan ini
3.11	Laporan menunjukkan adanya bukti-bukti klaim kredibel	Bukti terbatas untuk laporan ini tapi sedang diupayakan untuk meningkatkan bukti
3.12	Pelajaran-pelajaran penting diringkaskan	Lihat §5